

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Papua merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia dan berbatasan langsung dengan Papua New Guinea. Berbeda dengan penduduk Indonesia di bagian barat yang mayoritas penduduknya merupakan ras Melayu dengan ciri kulit terang, penduduk asli Papua memiliki kulit yang lebih gelap. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk di pulau Papua merupakan penduduk ras Melanesia. Sebagai wilayah tropis yang berbentuk kepulauan menyebabkan wilayah Papua memiliki potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis tinggi. Selain memiliki kekayaan alam yang melimpah, Papua juga memiliki kekayaan budaya yang sangat beranekaragam.

Papua secara resmi masuk ke dalam wilayah negara Indonesia pada tanggal 9 November 1969 setelah sebelum itu yakni pada tahun 1963, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengembalikan Irian Jaya Barat ke pemerintah Republik Indonesia melalui persyaratan. Persyaratan tersebut berisikan keharusan pemerintah Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada rakyat Papua untuk menentukan nasibnya apakah bergabung dengan Indonesia ataukah membentuk negara sendiri. Sesuai dengan persyaratan tersebut kemudian Pemerintah Indonesia melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) atau di dunia internasional dikenal dengan *act for free choice* pada tahun 1969.

Hasil Pepera menunjukkan keinginan mutlak rakyat Papua untuk bergabung dengan Pemerintah Indonesia. Keabsahan Pepera ini kemudian juga diakui oleh dunia internasional dengan dikeluarkannya Resolusi PBB nomor 2504 pada sidang umum PBB pada 19 November 1969. Dalam sidang tersebut sebanyak 82 negara menyatakan setuju, 30 negara menyatakan *absatain* dan tidak ada satu negara pun yang tidak setuju atas keabsahan Pepera Papua tersebut. Melalui resolusi PBB no 2504 tersebut sekaligus menjadi dasar pengakuan atas integrasi Papua dengan NKRI.¹

Resolusi PBB yang sekaligus menegaskan posisi Papua menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia namun pada kenyataannya resolusi ini tidak memuaskan sebagian pihak. Sejarah integrasi yang sudah sangat jelas diakui dunia internasional, oleh sebagian kelompok kecil di Papua dianggap tidak sah. Hal ini didasari oleh proses pelaksanaan Pepera terjadi banyak kecurangan termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Kelompok inilah yang kemudian pada perjalanannya memunculkan gelombang separatisme yang berupaya memisahkan diri dari Indonesia dan menamakan dirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Sebagai kelompok separatis yang ingin merdeka dari Indonesia, tentu tindakan ini tidak dibenarkan dan ditentang oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai upaya. Meskipun mendapatkan pertentangan, kelompok ini terus beraksi

¹ Sugiyanto, M. 2017. Organisasi Papua Merdeka (Opm) Dalam Perspektif Subjek Hukum Internasional. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

dengan berbagai cara agar mendapat dukungan dari pihak luar. Dalam menggalang dukungan kerap kali dilakukan di kawasan Pasifik.

Kawasan Pasifik, khususnya kawasan Pasifik Selatan yang secara geografis hampir identik dengan negara-negara di Asia Tenggara, belum masuk dalam lingkaran konsentris politik luar negeri Indonesia, bahkan negara-negara di kawasan tersebut hanya dianggap sebagai "halaman belakang" untuk Indonesia yaitu tempat yang jarang tersentuh oleh pemerintah. Ada banyak alasan mengapa kawasan Pasifik Selatan belum menjadi lingkaran konsentris Indonesia². Pertama, negara-negara di kawasan Pasifik Selatan merupakan negara kepulauan kecil, yang sebagian besar menggantungkan perekonomiannya pada pariwisata dan sektor pertambangan (kecuali Australia dan Selandia Baru), sehingga kurang menguntungkan untuk Indonesia.

Kedua, Indonesia melihat transisi dari Presiden Sukarno ke Presiden Suharto ketika negara-negara Pasifik Selatan mendekolonisasi dan memperjuangkan kemerdekaan pada tahun 1960-an dan 1980-an, sehingga kurang memperhatikan dinamika di kawasan.

Ketiga, sejak dekolonisasi kawasan Pasifik Selatan yang masih berlangsung, muncul semangat etnosentrisme di negara-negara kawasan, salah satunya Jalan Melanesia (Jalan Melanesia). Semangat inilah yang melahirkan sikap anti Indonesia di kalangan masyarakat ras Melanesia, karena Indonesia dianggap telah menjajah dan dituduh melakukan pelanggaran HAM terhadap ras Melanesia di

² Bappenas <https://www.bappenas.go.id/files/1113/5027/2586/bab-8-pemantapan-politik-luar-negeri-dan-peningkatan-kerjasama-internasional.pdf>

Papua sehingga Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan kerap berbeda pendapat tentang Papua di forum internasional, khususnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Perlu dicatat bahwa kawasan Pasifik Selatan dihuni oleh tiga ras besar, yaitu Mikronesia, Melanesia, dan Polinesia. *Melanesian Way* adalah gerakan yang diprakarsai oleh masyarakat di negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah ras Melanesia di Pasifik Selatan. Gerakan ini bertujuan untuk menegaskan kembali identitas, budaya dan gagasan masa depan ras Melanesia di seluruh dunia atau yang biasa dikenal dengan sebutan Melanesianisme. Negara-negara tersebut adalah Papua Nugini, Fiji, Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Kaledonia Baru. Secara umum, ras Melanesia adalah ras dengan kulit gelap, rambut keriting, kerangka besar dan kuat, serta profil tubuh atletis.³ Persamaan mengenai ras ini kemudian memberi pengaruh pada pergerakan atau aktifitas OPM dalam mencari dukungan Internasional. Selain persamaan ras, isu-isu pelanggaran HAM kerap kali juga dijadikan bahan dalam meraih dukungan negara-negara di Melanesia bahkan di luar kawasan tersebut.

Pada awal kemunculannya Organisasi Papua Merdeka (OPM) terdiri dari banyak kelompok-kelompok yang terpecah. Keterpecahan ini kemudian disadari oleh OPM justru akan menjadi hambatan bagi OPM untuk menggalang dukungan internasional. Perwakilan faksi-faksi ini kemudian bertemu untuk melakukan

³Firman, T. (2016, Agustus 26). Ribuan Tahun Orang Melanesia di Indonesia. diakses 6 Juni 2020 dari [www.tirto.id: https://tirto.id/ribuan-tahun-orangmelanesia-di-indonesia-bEYN](https://tirto.id/ribuan-tahun-orangmelanesia-di-indonesia-bEYN)

rekonsiliasi yang di fasilitasi oleh negara Vanuatu dan terbentuklah *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) pada tahun 2014.⁴

Dalam mencari dukungan di wilayah sub regional tersebut, ULMWP mencari dukungan melalui *Melanesia Spearhead Group* (MSG) sebagai organisasi negara-negara rumpun Melanesia. MSG merupakan organisasi kerjasama sub regional yang beranggotakan Papua New Guinea, Kepulauan Solomon, Fiji, Vanuatu, dan juga *Front de Liberation Nationalite Kanak et Socialiste* (FLNKS) dari negara Kaledonia Baru. MSG lahir atas dasar semangat solidaritas etnis yang tinggi dari berbagai negara ras Melanesia. Rasa solidaritas yang tinggi ini juga mendorong munculnya perjuangan ras Melanesia untuk dapat menentukan nasibnya sendiri dan tidak dijajah oleh ras lain atau yang dikenal dengan *The Melanesian Way*.

Meskipun Indonesia memandang kawasan Pasifik Selatan hanya sebagai "halaman belakang", Indonesia juga belum menutup hubungan eksternalnya dengan negara-negara di kawasan. Perlu dicatat bahwa Indonesia memiliki kedutaan besar resmi di Papua Nugini, Fiji, dan Kaledonia Baru. Persoalan pelanggaran HAM di Papua oleh pemerintah Indonesia yang terus suarakan oleh negara-negara Melanesia, membuat Indonesia mau tidak mau menempuh kebijakan *Look East*.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dimulai pada 20 Oktober 2014, Indonesia berupaya meningkatkan hubungan dengan bangsa-bangsa ras Melanesia di Pasifik Selatan. Hal ini tercermin dari peningkatan status

⁴ Sabir, A. 2018. Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua. *Jurnal Hubungan Internasional*. Xi(1), 91-108

keanggotaan Indonesia dari yang sebelumnya observer ditahun 2011 menjadi anggota asosiasi organisasi sub-regional Melanesian Spearhead Group (MSG) pada KTT MSG ke-20 pada tanggal 26 Juni 2015 di Honiara, Kepulauan Solomon.⁵ Dengan peningkatan status Indonesia, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih besar dalam organisasi karena pada saat yang sama kelompok kemerdekaan *United Liberation Movement for West Papua*(ULMWP) mengajukan diri untuk bergabung dengan MSG dan ULMWP hanya harus puas sebagai pengamat di MSG.⁶ Wakil Menteri Luar Negeri RI, A.M. Fachir yang mewakili pemerintah RI dalam KTT memberikan pernyataan yang dikutip dari *Metrotvnews.com* bahwa:

"Peningkatan status sebagai associate member, Indonesia berkomitmen untuk terus mempromosikan kerja sama yang erat dan konkrit dengan MSG untuk menggali potensi dan mengatasi tantangan pembangunan bersama,"⁷

ULMWP dibentuk sebagai wadah koordinasi kegiatan internal dan representasi kelompok separatis dalam melakukan komunikasi keluar ke berbagai kelompok dan lembaga lain. Pada KTT MSG di Honiara, Kepulauan Solomon tanggal 26 juni 2015, ULMWP diterima sebagai *observer*.⁸ Dengan diterimanya posisi ULMWP sebagai pengamat maka ULMWP memiliki legitimasi,

⁵Arisandy, Y. (2015, Juni 27). Indonesia Peroleh Anggota Asosiasi Dalam MSG. diakses 6 Juni 2020 dari [www.antaranews.com](https://www.antaranews.com/berita/503823/): <https://www.antaranews.com/berita/503823/> indonesia peroleh-status-anggota-asosiasi-dalam-msg

⁶ Retaduari, E. A. Kelompok Pro-Papua Merdeka Gagal Jadi Anggota Penuh MSG. diakses 7 Juni 2020 dari [www.detik.news.com](https://news.detik.com/): <https://news.detik.com/> berita/3253641/ kelompok-propapua-merdeka-gagal-jadi-anggota-penuh-msg

⁷Nugraha, F. Raih Status Anggota MSG, Indonesia Siap Kerja Sama Teknis. diakses 3 Juni 2020 dari [www.metrotvnews.com](http://internasional.metrotvnews.com): <http://internasional.metrotvnews.com> /asia/zNP6aBWk -raih-status-anggota-msg-indonesia-siap-perkuatkerja-sama-teknis

⁸ Raoziqi, M. 2020. Diplomasi Soft Power Indonesia dalam Melanesian Spearhead Group terhadap United Liberation Movement for West Papua. *Journal of International Relations*. 6(2), 189-198

kepercayaan dan baik dari sebagian rakyat di Papua maupun dukungan negara-negeran Melanesia.

Diterimanya keanggotaan ULMWP di dalam wadah MSG pun mendorong pemerintah Indonesia untuk membendung manuver yang terus gencar dilakukan oleh ULMWP. Hal ini di dorong oleh keinginan Indonesia untuk menjaga integrasi wilayah Papua dalam rangka mempertahankan keutuhan negara Indonesia. Jika dilihat pada bahasan di atas dimana ULMWP yang terus mencari dukungan di daerah pasifik, upaya yang dilakukan oleh Indonesia juga dilakukan di kawasan yang sama. Jauh sebelum ULMWP diterima sebagai pengamat sebenarnya Indonesia telah menempatkan posisi serupa di dalam keanggotaan MSG sejak tahun 2011.⁹

Berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka membendung atau meredam kelompok separatis di Papua. Pendekatan militer pun pernah ditempuh oleh pemerintah Indonesia di era Presiden Soeharto dalam meredam gerakan seperatais. Namun pada kenyataannya pendekatan militer justru menimbulkan rasa tidak percaya atau *distrust* dari masyarakat itu sendiri bahkan juga dunia internasional. Pendekatan militer dapat dikatakan tidak menunjukkan hasil yang signifikan mengingat aktifitas dari kelompok ULMWP masih gencar melakukan berbagai manuver di berbagai kesempatan.

Vanuatu, New Caledonia, dan Kepulauan Solomon merupakan Negara yang mendukung keras ULMWP untuk bisa diterima sebagai anggota MSG. Dukungan

⁹Blades, J. 2019. Gerakan Pembebasan Papua Barat Daftar Keanggotaan Penuh Serikat Negara Pasifik. diakses tanggal 20 Agustus 2020 dari <https://www.matamatapolitik.com/in-depth-gerakan-pembebasan-papua-barat-daftar-keanggotaan-penuh-msg/>,

ini dapat terlihat tatkala diselenggarakannya KTT MSG pada tanggal 14 Juli 2016 yang diadakan di Kepulauan Solomon, terjadi aksi demo dari ketiga Negara tersebut.¹⁰ Keputusan mengenai keanggotaan terbaru ULMWP juga menjadi pokok bahasan penting dalam KTT tersebut. Isu pelanggaran HAM di Papua Barat bisa dijadikan alasan Negara anggota MSG untuk dibawa ke PBB dan meminta diadakannya referendum apabila ULMWP menjadi anggota tetap di dalam MSG.¹¹ Harapan *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) untuk bisa menjadi anggota tetap di dalam MSG belum dapat tercapai. ULMWP ditolak karena untuk bisa menjadi anggota tetap, harus melalui beberapa tahap ,yakni dari pengamat, negara asosiasi hingga anggota penuh¹²

Kepentingan nasional suatu Negara tidak bisa di lepaskan dari isu Kedaulatan. Kepentingan nasional Indonesia dalam hal ini adalah untuk mempertahankan wilayah Papua sebagai bagian dari Indonesia. Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dimulai pada 20 Oktober 2014, Indonesia berupaya meningkatkan hubungan dengan bangsa-bangsa ras Melanesia di Pasifik Selatan untuk mengubah dukungan negara-negara MSG dalam kaitanya dengan kelompok separatis Papua. Hal ini tercermin dari peningkatan status keanggotaan Indonesia di tahun 2011 yakni *observer* menjadi *associte member* organisasi MSG pada saat

¹⁰ Mass Rally Vanuatu Calls West Papuas MSG Membership <https://www.ulmwp.org/mass-rallyvanuatu-calls-west-papuas-msg-membership> , diakses pada 21 Juni 2020.

¹¹ Hari Ke-2 KTT MSG, Rakyat Solomon Island Gelar Aksi Dukong ULMWP http://kbr.id/berita/072016/hari_ke_2_ktt_msg_rakyat_solomon_island_gelar_aksi_dukung_ulmwp/83096.html, diakses pada 21 Juni 2020

¹² Jaringan Separatis ULMWP Di tolak Menjadi Full Member MSG di KTT Honiara Kepulauan Solomon <http://www.facta-news.com/jaringan-separatis-ulmwp-ditolak-menjadi-full-member-msg-di-ktt-honiara/> , diakses pada 21 Juni 2020

KTT MSG ke-20 yang diadakan di Honiara, Kepulauan Solomon.¹³ Peningkatan status ini Indonesia berkomitmen untuk terus mempromosikan kerjasama yang erat dan konkrit dengan MSG.¹⁴ Kita pun telah menyadari bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia di Papua dalam keadaan baik-baik saja, masyarakat menjalankan aktivitasnya secara normal dan kondusif. Tujuan Indonesia menjadi anggota MSG adalah untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dan budaya. Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi memberikan perhatian serius kepada komunitas wilayah itu.

B. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik suatu pokok permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana upaya diplomasi pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo (2014-2019) untuk mengubah sikap dukungan Negara anggota MSG terhadap kelompok separatis Papua Barat ke Indonesia?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang berjudul “Diplomasi Indonesia Melalui *Melanesian Spearhead Group* terhadap *United Liberation Movement for West Papua* Di Era Presiden Joko Widodo Tahun 2014-2019” ini adalah sebagai berikut:

¹³ Zuhdi, R. 2018. Peningkatan Status Indonesia menjadi Associate Member Melanesian Spearhead Group (MSG). Skripsi Fakultas Ilmu Politik dan Sosial. Universitas Jember

¹⁴ Nugraha, F. Raih Status Anggota MSG, Indonesia Siap Kerja Sama Teknis. diakses 3 Juni 2020 dari www.metrotvnews.com: <http://internasional.metrotvnews.com/asia/zNP6aBWk-raih-status-anggota-msg-indonesia-siap-perkuatkerja-sama-teknis>

1. Menjelaskan diplomasi-diplomasi yang digunakan oleh Republik Indonesia dengan *Melanesian Spearhead Group* (MSG) yang dilakukan di Indonesia ataupun dilakukan dengan Negara anggota MSG.
2. Menganalisis diplomasi Republik Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI di Papua Barat melalui *soft diplomacy* dengan Melanesian Spearhead Group (MSG).
3. Menjelaskan upaya Republik Indonesia di Melanesian Spearhead Group (MSG) dalam kaitanya meredam upaya separatisme di Papua Barat yang dilakukan oleh *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP).
4. Menjelaskan mengenai pengaruh dari diplomasi Indonesia dengan Negara anggota MSG maupun MSG terhadap kedaulatan NKRI di Papua Barat.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori yang digunakan untuk dapat menjawab rumusan penelitian mengenai langkah-langkah diplomasi yang dilakukan Indonesia dengan Melanesian Spearhead Group (MSG) terhadap kedaulatan Indonesia di Papua Barat dilihat dari teori organisasi internasional dan konsep diplomasi.

1. Konsep Organisasi Internasional

Organisasi internasional adalah organisasi antarnegara yang diikat oleh perjanjian untuk menjamin tujuan bersama.¹⁵ Menurut Archer Organisasi internasional adalah:

Suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah)

¹⁵ Didi Krisna, *Kamus Politik Internasional*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana, 1993, hlm. 67

dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.¹⁶

Sementara itu Clive Archer mengemukakan tentang tiga peran yang dimiliki oleh Organisasi Internasional yakni:

- a) Sebagai Instrumen. Organisasi Internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
- b) Sebagai Arena. Organisasi Internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi.
- c) Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa di pengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.

Organisasi antarnegara ialah ikatan yang melampaui batas-batas wilayah nasional yang ditetapkan untuk membentuk suatu kelembagaan agar dapat memudahkan kerjasama diantarapihak terkait di berbagai bidang. Perjanjian untuk menjamin tujuan bersama dalam organisasi internasional adalah kesepakatan-kesepakatan yang disetujui anggota-anggotanya.

Melanesia Spearhead Group adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara rumpun Melanesia. Untuk menjamin tujuan dari Melanesia Spearhead Group ini, mereka telah menandatangani "*Agreement Establishing The Melanesian Spearhead Group*".

Dari pengertian organisasi internasional menurut Clive Archer diatas, *Melanesian Spearhead Group* (MSG) sebagai organisasi internasional yang

¹⁶ Archer, Clive. 1983. *International Organization*. London. Allen & Unwin Ltd.

beranggotakan pemerintah dari negara-negara yang berdaulat memiliki struktur organisasi yang formal yang dibentuk berdasarkan kesepakatan negara-negara anggotanya yang bertujuan untuk mengejar kepentingan para anggotanya yaitu untuk mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antar anggota, pertukaran budaya Melanesia, tradisi dan nilai, persamaan kedaulatan, serta kerja sama teknik guna mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, *good governance*, dan keamanan. Untuk menjamin tujuan bersamayang telah disepakati, tujuan serta maksud pemebentukan organisasi ini di atur dalam "*Agreement Establishing The Melanesian Spearhead Group*" pasal ke-2.

Organisasi internasional bertindak sebagai Instrumen, yang mana Organisasi Internasional digunakan oleh negara untuk mengejar kepentingan mereka. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwasanya suatu negara (anggota) masuk ke dalam organisasi karena didorong oleh kepentingan dan organisasi bisa dijadikan alat bagi anggota-anggotanya untuk mengejar kepentingan mereka.

Setiap Negara yang berdaulat memiliki hubungannya dengan dunia internasional, baik dengan Negara maupun organisasi internasional lainnya. Hubungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan politik luar negeri yang dijalankan oleh suatu negara dan merupakan pencerminan dari kepentingan nasionalnya. Bergabungnya Indonesia ke MSG juga tidak lepas dari kepentingan Indonesia yakni menjaga kedaulatan wilayah Indonesia dari kelompok separatis ULMWP yang berusaha memisahkan Papua Barat dari Indonesia dengan mencari dukungan dari negara-negara di MSG.

Peran sebagai Forum atau arena menyiratkan pengertian bahwasanya Organisasi Internasional menyediakan dirinya sebagai arena tempat terjadinya kegiatan-kegiatan organisasi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah-masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.

Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua Barat kerap kali di suarkan oleh Kelompok separatis ULMWP di berbagai forum internasional khususnya MSG. Rasa solidaritas sesama bangsa Melanesia, membuat gerakan-gerakan yang menginginkan Papua Barat merdeka mendapat sambutan positif dari negara-negara di kawasan Melanesia. Hal inilah yang kemudian MSG digunakan oleh Indonesia untuk menegaskan kembali mengenai kondisi sebenarnya di Papua Barat melalui pertemuan-pertemuan rutin. Melalui Dubes A.M Farchir, Indonesia menegaskan komitmen serius Pemerintah untuk memajukan kerjasama konkret dengan negara-negara anggota MSG.¹⁷ Hubungan tersebut semakin membaik ketika Indonesia menjadi observer pada *MSG Leader Summit* ke-18 yang diselenggarakan di Fiji tanggal 31 Maret 2011 (MSG, 2011). Diplomasi dan kerjasamapun dilakukan Indonesia saat menjadi pengamat (observer) dengan negara-negara Anggota Melanesia, Indonesia membangun kerjasama teknis di berbagai bidang, seperti di bidang perikanan, produksi kerajinan, seni budaya, dan diplomasi.

¹⁷Kemlu, 2012. Partisipasi Indonesia Sebagai Observer pada KTT Khusus Melanesian Spearhead Group (MSG). [Online] Available at: <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Partisipasi-Indonesia-Sebagai-Observer-pada-KTT-Khusus-Melanesian-Spearhead-Group-MSG.aspx> [Diakses 23 Juni 2020]

Peran ketiga dari organisasi internasional adalah sebagai aktor yang independen, dimana independen dapat diartikan apabila organisasi internasional dapat bertindak tanpa dipengaruhi kekuatan dari luar. Dalam hal ini, organisasi internasional dapat memberikan masukan-masukan secara netral tanpa ada kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dari luar.

Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional.¹⁸ Sebagai actor yang independen, Organisasi Internasional dapat bertindak tanpa di pengaruhi oleh kekuatan-kekuatan luar organisasi. Sama halnya dengan *Melanesian Spearhead Group* yang juga melakukan perannya sebagai actor Independen. Hal ini dapat dilihat dari keputusan yang dibuat oleh MSG, dengan meningkatkan status kenggotan Indonesia dalam MSG menjadi negara asosiasi atau *associate member* pada KTT MSG ke-20 di Honiara Kepulauan Solomon pada taun 2015 dimana sebelumnya Indonesia menyandang status sebagai negara observer. Padahal keputsan yang di ambil oleh MSG dilakukan di saat banyak negara khususnya negara dikawasan pasifik menyoroti terkait isu Pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua Barat.

2. Konsep Diplomasi

Diplomasi dalam hubungannya dengan politik internasional adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam mengatur dan menjalin suatu

¹⁸Perwita dan Yani.2005.Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Remaja Rosdakarya.

hubungan dengan negara-negara sekitarnya. Pengertian diplomasi menurut Haji Agus Salim yakni cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh suatu negara dalam mencapai kepentingannya. Sedangkan menurut Satow:

Diplomasi merupakan sebuah manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor dalam hubungan internasional.¹⁹

Suatu Negara melakukan upaya diplomasi untuk mengejar kepentingan nasional dengan cara saling tukar-menukar informasi secara rutin dengan negara lain atau rakyat di negara lain. Diplomasi ini juga diperlukan oleh Negara untuk mengubah sikap dan tingkah laku lawannya. Mengandalkan manajemen hubungan internasional yang dilakukan oleh para diplomat di luar negeri tidak cukup untuk membuat diplomasi tersebut sukses, akan tetapi juga harus memperhatikan beberapa elemen seperti kebijakan dari menteri luar negeri, maupun publik itu sendiri.²⁰

Kepentingan nasional Indonesia di dalam hal keanggotaannya dalam MSG adalah dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI di Papua Barat sehingga negara-negara yang tergabung dalam MSG tidak akan melakukan intervensi berkaitan dengan isu di Papua Barat. Dalam upaya mencapai kepentingan nasional tersebut diupayakan oleh Indonesia melalui jalur diplomasi. Berikut ini merupakan diplomasi-diplomasi yang sesuai dengan penulisan ini:

¹⁹Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2008, hlm.3-4.

²⁰*Ibid*, hlm. 14-15.

a. Diplomasi Multilateral

Diplomasi multilateral diartikan sebagai pelaksanaan politik luar negeri yang dilakukan di forum atau organisasi internasional yang beranggotakan banyak Negara. Diplomasi jenis ini seringkali membawa beberapa agenda atau isu yang perlu diselesaikan bersama-sama.²¹ Permasalahan yang berkaitan kejahatan transnasional, separatisme, terorisme, perdagangan manusia, *illegal logging* hingga masalah pengungsi merupakan contoh isu-isu yang sering dibawa dalam diplomasi ini.

Dalam diplomasi ini, setiap permasalahan yang muncul selalu diselesaikan dengan jalan konsensus. Hal tersebut dapat mempermudah suatu negara untuk menjalin hubungan persahabatan dengan negara lainnya. Dalam diplomasi multilateral ini, keberhasilan dalam negosiasi sangat dapat diwujudkan dan ini menjadi suatu strategi diplomasi yang terbilang cukup efektif.²²

Perkembangan global yang demikian kompleks tidak lagi memberikan kemudahan bagi diplomasi lajur satu (*track one*) sehingga diplomasi menjadi multilajur (*multitrack*). Di masa mendatang akan terjadi kolektivitas institusi negara maupun aktor non negara yang berkolaborasi dalam menjalankan hubungan internasional. Posisi Indonesia yang dikelilingi oleh kekuatan besar regional seperti Cina, Jepang, dan India yang

²¹ Djelantik, Sukawarsini, 2008, Diplomasi antara Teori dan Praktik (Diplomacy: Theory and Practice), Graha Ilmu, Bandung

²² Djelantik Sukawarsini, Diplomasi antara Teori dan Praktik. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm.

juga merupakan negara pemilik senjata nuklir atau *Nuclear Weapons States* (NWS) dan *Nuclear Threshold States* (Jepang, Korsel, dan Taiwan).²³ Selain itu, di sekeliling Indonesia ada FPDA, MSG, BRIC, ABCA, rezim-rezim internasional seperti WTO, IMF, APEC, dan sebagainya menambah kompleksnya persoalan yang memerlukan aktor lain dalam melakukan dan menutup celah-celah kosong dalam menjalankan diplomasi pertahanan demi kepentingan nasional Indonesia.

Isu separatisme di Papua Barat yang mana dalam penyelesaian masalahnya melibatkan berbagai negara merupakan salah satu contoh dari Diplomasi multilateral Indonesia dalam MSG.

Dalam penulisan ini implementasi bagi agenda isu HAM yang ada di Papua Barat diselesaikan bersama-sama dalam diplomasi multilateral dengan adanya *Bali Democracy Forum*. Indonesia yang bertindak sebagai tuan rumah yang turut mengundang negara-negara yang tergabung dalam MSG. Terselenggaranya *Bali Democracy Forum* merupakan bentuk diplomasi Indonesia yang ditujukan untuk meluruskan isu negatif tentang kelompok pro kemerdekaan di Papua yang seringkali mendapat dukungan dari negara MSG.

b. Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi adalah salah satu bentuk diplomasi yang mempergunakan instrument ekonomi guna mencapai tujuan dan

²³ Barry Buzan dan Ole Weaver, *Regions and Power: The Structure of International Security*, (UK: Cambridge University Press, 2003), hlm. 101.

kepentingan negara (atau lembaga lain seperti korporasi) tertentu.²⁴ Secara umum, diplomasi ini diterjemahkan sebagai proses pengajuan kebijakan dan keputusan serta berbagai konsultasi tentang kemudahan dan prospek ekonomi guna mencapai tujuan dan kepentingan nasional, untuk dinegosiasikan agar dapat disepakati oleh negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Diplomasi ekonomi biasa merujuk kepada kepentingan untuk masalah perdagangan (*export/import*), investasi, pinjaman, pelaksanaan proyek pembangunan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi.

Secara luas, Rana mendefinisikan diplomasi ekonomi sebagai suatu proses, dimana suatu negara menyelesaikan masalahnya dengan negara lain, guna memaksimalkan pendapatan dan perolehan negara melalui kegiatan ekonomi dan pertukaran ekonomi, baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Perdagangan, investasi, masuknya teknologi, dan bantuan ekonomi merupakan faktor utama berhasil atau tidaknya diplomasi Ekonomi ini.²⁵

Agar diplomasi ekonomi berhasil dilaksanakan dengan baik, diperlukan langkah-langkah dalam melaksananya. Langkah-langkah ini diantaranya dengan membangun jaringan keluar melalui hubungan bilateral maupun multilateral, menjalin kerjasama dalam memecahkan permasalahan perkonomian, mengirimkan utusan dagang.²⁶

²⁴Solichin, Harianto dan Taat Subekti. Jurnal Diplomasi Ekonomi Indonesia.

²⁵ Sukawarsini Djelantik, *op.cit*, hlm.230.

²⁶*Ibid*, hlm.233-235.

c. Diplomasi Publik

Kamus Hubungan Internasional mendefinisikan bahwa diplomasi publik didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan negara untuk mempengaruhi opini publik di negara lain dengan menggunakan beberapa instrumen seperti film, pertukaran budaya, radio dan internet. Diplomasi ini mencakup aktifitas pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat di negara lain untuk mencapai kepentingan tertentu salah satunya bertujuan memperbaiki citra suatu negara.²⁷

Munculnya aktor-aktor non negara di tahun 1990an menjadi sinyal meningkatnya diplomasi publik. Ketika Orba berkuasa, Indonesia seringkali menggunakan *hardpower* dalam meredam kelompok separatis. Pendekatan militer yang dilakukan ini justru menimbulkan rasa kebencian, ketakutan dan ketidakpercayaan rakyat Papua terhadap Pemerintah. Pelajaran ini yang kemudian dipakai Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo, ketika berhadapan dengan isu separatisme. Di undanginya perwakilan negara-negara Melanesia dalam Festival kebudayaan Melanesia di Indonesia untuk menampilkan kebudayaan yang mereka punya, merupakan bagian dari diplomasi public yang digunakan oleh Indonesia.

d. Diplomasi Bilateral

Pada diplomasi multilateral yang mana mengutamakan adanya suatu kerjasama dalam sebuah wadah atau forum internasional, diplomasi bilateral ini lebih mengutamakan kerjasama antar dua negara melalui

²⁷ Kishan Rana, *op.cit*, hlm.77-78.

hubungan politik yang melibatkan dua negara. Diplomasi bilateral tidak menutup kemungkinan ini dilakukan sela-sela diplomasi multilateral, yang mana dua negara saling membuat perjanjian saat konferensi sedang berlangsung. Penandatanganan perjanjian (traktat), tukar menukar Duta Besar, dan kunjungan kenegaraan merupakan contoh dari diplomasi bilateral.²⁸ Dibukanya kedutaan besar negara Vanuatu di Indonesia. Serta kunjungan beberapa menteri ke negara Melanesia juga merupakan implementasi diplomasi Bilateral.

E. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teoritik yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis menarik sebuah hipotesa dari penelitian ini bahwa Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2019) berupaya mengubah dukungan negara-negara anggota MSG terhadap Papua Barat ke Indonesia dengan melakukan berbagai upaya:

1. Indonesia menggunakan *Melanesian Spearhead Group* (MSG) sebagai Instrumen politik dan sebagai forum untuk mencapai kepentingan nasional dalam rangka meredam separatism di wilayah Papua.
2. Indonesia melakukan berbagai macam diplomasi
 - a. Diplomasi Multilateral

²⁸*Ibid*, hlm. 85.

Terselenggarakannya Bali Democracy Forum yang mengundang negara-negara anggota MSG merupakan upaya diplomasi multilateral Indonesia yang kemudian menjadi forum untuk membahas sekaligus mencari solusi terhadap isu pelanggaran HM yang terjadi di Papua Barat

b. Diplomasi Ekonomi

Diplomasi Ekonomi Indonesia terhadap negara-negara anggota MSG dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas ekonomi melalui peningkatan ekspor dari negara anggota MSG ke Indonesia. Indonesia juga menyelenggarakan pelatihan yang bernama *International Training Program on Fisheries Product Processing and Seashell Handicraft Making*.

c. Diplomasi Publik

Penyelenggaraan Festival kebudayaan Melanesia merupakan diplomasi publik yang Indonesia lakukan dengan mengundang negaranegara Melanesia untuk menampilkan kebudayaannya dalam festival tersebut.

d. Diplomasi Bilateral

Dibukanya kedutaan besar negara-negara kawasan Melanesia di Indonesia ataupun sebaliknya seperti Vanuatu serta Kepulauan Solomon di Indonesia

merupakan implementasi diplomasi Bilateral Indonesia dengan negara-negara di Melanesia. Presiden Joko Widodo juga melakukan kunjungan ke negara-negara MSG, serta melakukan perjanjian atau *traktat*.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk mempermudah penulisan, penulis akan membatasi ruang lingkup kajian agar penulis tidak menyimpang dari tema atau tujuan yang diinginkan. Fokus utama dari penulisan ini adalah membahas diplomasi Indonesia dengan MSG dalam memelihara kedaulatan NKRI di Papua Barat di era Presiden Joko Widodo tahun 2014-2019. Namun demikian tidak menutup kemungkinan apabila penulis akan menjelaskan diluar batasan tersebut. Menengok kembali peristiwa-peristiwa sebelumnya untuk memperkuat dan dapat dijadikan data pendukung penulisan, dengan catatan diperhatikan relevansinya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mana pengumpulan data dan fakta penulis menggunakan analisis dengan penjelasan sehingga data yang di peroleh merupakan data sekunder yang di dapatkan dari buku pustaka, makalah ilmiah, internet, majalah, berita online, jurnal, serta sumber-sumber laian yang releva dengan permasalahan yang akan dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab tertentu. Berikut rincian dan gambaran umum setiap bab:

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini berisikan mengenai pernyataan masalah sehingga penulis mengambil tema dan judul seperti yang tertera di bagian sampul. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis yang mendasari sebuah skripsi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II DINAMIKA POLITIK EKONOMI SOSIAL PAPUA BARAT.

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum permasalahan sospol dan ekonomi yang terjadi di Papua Barat sehingga memunculkan gerakan separatisme baru. Masing-masing permasalahan di Papua Barat seperti isu pelanggaran HAM, masalah referendum ulang, gerakan ULMWP, pentingnya Papua Barat bagi Indonesia ditinjau dari kekayaan alam Papua Barat dan ketertinggalan Papua Barat.

BAB III DUKUNGAN MSG TERHADAP PAPUA BARAT.

Bab ini membahas mengenai gambaran umum organisasi sub regional MSG seperti sejarah singkat MSG, masalah separatisme yang sering dialami negara-negara anggota MSG, agenda MSG seperti KTT dan eksistensi MSG di Pasifik Selatan serta dukungan dan intervensi sebagian negara anggota MSG terhadap Papua Barat

BAB IV DIPLOMASI INDONESIA DALAM MSG DALAM RANGKA MENJAGA KEDAULATAN WILAYAH INDONESIA DI PAPUA BARAT PERIODE 2014-2019.

Bab ini menganalisis langkah-langkah diplomasi yang Indonesia lakukan di dalam MSG. Diplomasi yang dibahas yakni diplomasi bilateral, diplomasi budaya, diplomasi ekonomi kemaritiman dan Bali Democracy Forum sebagai unjuk gigi keamanan demokrasi di Indonesia terhadap MSG. Lalu sub bab berikutnya berisi mengenai posisi Indonesia di MSG, kondisi kedaulatan NKRI di Papua Barat setelah diplomasi dilakukan, dan masa depan Gerakan Separatis Papua dengan mengambil sampel ULMWP.

BAB V PENUTUP.

Bab ini berisikan kesimpulan dari seluruh bab-bab sebelumnya yang dibahas.

